

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah.

- a. Penerapan SLF di Kota Bandung secara umum setelah diterbitkannya Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 375 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung perlu dievaluasi bahwa peningkatan masih belum begitu signifikan pada SLF yang telah terdaftar.
- b. Setelah mengidentifikasi faktor-faktor dimiliki, beberapa diantaranya menjadi prioritas pada penerapan SLF di Kota Bandung yaitu kriteria eksternal sangat berpengaruh dan menjadi perhatian paling tinggi dalam strategi penerapan SLF di Kota Bandung. Dengan begitu faktor-faktor yang penting adalah “keberadaan kebutuhan SLF sebagai persyaratan dari pihak lain”, “kesadaran pemilik/pengelola gedung masih kurang”, dan “tidak memahami manfaat dari SLF bagi bangunan gedung”.
- c. Upaya untuk mendorong penerapan SLF oleh Pemerintah Kota Bandung dapat melibatkan strategi sosialisasi terutama kepada pemilik atau pengelola bangunan gedung. Hal ini juga mencakup peningkatan pemahaman mengenai manfaat SLF bagi bangunan gedung. Pendekatan yang dapat ditempuh dalam kerjasama antara pemerintah dan masyarakat melibatkan kolaborasi dengan sektor swasta dan kelompok masyarakat sipil. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap penerapan SLF.

Strategi yang dapat diterapkan seperti berikut:

1. Tingkatkan penegakan peraturan terkait SLF untuk memastikan bahwa semua properti memenuhi standar keselamatan dan kesehatan yang

- ditetapkan. Lakukan audit rutin terhadap properti-properti di Kota Bandung untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan SLF.
2. Berlakukan sanksi yang tegas terhadap pemilik properti yang tidak mematuhi peraturan. Pertimbangkan pencabutan izin yang dimiliki oleh pemilik properti yang secara berulang melanggar peraturan SLF.
  3. Evaluasi dan perbarui prosedur perizinan untuk mendapatkan SLF agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh pemilik properti. Identifikasi dan hapus langkah-langkah yang tidak perlu atau menghambat proses.
  4. Percepat proses perizinan dengan memanfaatkan teknologi digital dan meminimalkan birokrasi yang tidak perlu. Terapkan sistem perizinan *online* untuk mempercepat dan memudahkan pemrosesan permohonan SLF.
  5. Dukung pemilik properti dengan memberikan panduan praktis untuk memenuhi persyaratan SLF. Buat materi edukatif, baik dalam bentuk cetak maupun digital, untuk memberikan informasi yang komprehensif mengenai persyaratan SLF.

## **5.2 Saran**

Penelitian ini melakukan evaluasi terhadap penerapan SLF di Kota Bandung, mengacu pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 375 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang telah dikeluarkan. Untuk penelitian berikutnya, diharapkan dapat lebih mendalam dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi, sehingga dapat menemukan strategi penerapan SLF yang lebih optimal. Meskipun terdapat keterbatasan waktu dan sumber daya, hasil analisis penelitian ini terfokus pada identifikasi dan pemetaan faktor-faktor secara umum, serta adanya perbedaan dengan kondisi yang ada.

## Daftar pustaka

- Aczél, J., & Saaty, T. L. (1984). Procedures for Synthesizing Ratio Judgements. *Journal of mathematical Psychology*.
- Arthur, D. (2023). Kriteria Dalam Pengambilan Keputusan Pemilihan Pemasok Pada Proyek Konstruksi dengan Pendekatan Analytic Hierarchy Process.
- Chamid, A., & Murti, A. (2017). Kombinasi Metode AHP dan TOPSIS pada Sistem Pendukung Keputusan.
- Elora, D. (2021). *Sertifikat Laik Fungsi pada Bangunan Gedung di Kota Bandung dalam Kaitannya dengan Izin Mendirikan Bangunan*.
- Galavan, R. (2004). Doing Business Strategy.
- Harisun, E. (2013). Kajian Sistem Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung Di Kota Ternate Propinsi Maluku Utara.
- Heriyusman, D. (2021). *Pemetaan Faktor-Faktor Pengaruh Implementasi Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung: Pendekatan GAP Analysis*.
- Iskandar, B., & Dini, S. N. (2013). Evaluasi Pelaksanaan Sertifikat Laik Fungsi untuk Gedung Pemerintah Di Kota Semarang.
- Janizar, S., & Anisarida, A. A. (2019). *Pendekatan Soft System Methodology Untuk Penerapan Proses Sertifikat Layak Fungsi (SLF) Suatu Bangunan Gedung*.
- Juliardi, R. D., Puri, E. R., & Aziza, M. I. (2021). Temporary Occupancy Permit ( SLF ) for Building Sustainable Strategy. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*.
- Kencana, M. R. (2018). Diambil kembali dari Liputan 6: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3516059/hingga-april-2018-92-persen-kabupaten-dan-kota-miliki-perda-bangunan-gedung>

- Kencana, M. R. (2018, May 9). *Hingga April 2018, 92 Persen Kabupaten dan Kota Miliki Perda Bangunan Gedung*. Diambil kembali dari Liputan6: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3516059/hingga-april-2018-92-persen-kabupaten-dan-kota-miliki-perda-bangunan-gedung>
- Krejci, J., & Stoklasa, J. (2018). Expert Systems With Applications. *Aggregation in the analytic hierarchy process: Why weighted geometric mean should be used instead of weighted arithmetic mean*.
- Kusrini. (2007). Konsep dan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan.
- Manlian Ronald. A. Simanjuntak, B. (2013). *IDENTIFIKASI VARIABEL PENTING KEANDALAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA SERANG*.
- Mardiana, & Hartati, E. (2018). Analisis Rencana Strategi Teknologi Informasi Perusahaan.
- Nafigati, Z. (2018). *Evaluasi Pelaksanaan Sertifikat Laik Fungsi Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung Di Kota Malang*.
- Nugraha, I. (2020). *Fungsi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Operasional Perizinan Bangunan Gedung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung Di Kota Bandung*.
- Nur'aeni, R. D. (2018). *Pengembangan Penilaian Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung Dalam Rangka Implementasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Di Kota Bandung*.
- Prajnaparamitha, K., & Ghoni, M. R. (2020). *Penggunaan Sertifikat Layak Fungsi Sebagai Sarana Perlindungan Pekerja*.
- R.A., M. (2016). Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung Negara pada Pemerintah Kota Semarang.
- Rani, H. A., & Muhammad, H. (2021). *Penerapan Sertifikasi Laik Fungsi Terhadap Bangunan Publik Di Kota Banda Aceh*.
- Saaty, T. (1994). How To Make A Decision: The Analytic Hierarchy Process.

Saaty, T. (2008). Decision Making with the Analytic Hierarchy Process. *International Journal of Services Sciences*.

Sasongko, A., Astuti, I., & Maharani, S. (2017). Pemilihan Karyawan Baru Dengan Metode AHP (Analytic Hierarchy Process).

Syaifullah. (2010). Pengenalan Metode AHP ( Analytical Hierarchy Process).

Wiharti, W., As'ad, S., & Handayani, F. S. (2023). Studi Perbandingan Kebijakan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. *Kebijakan Sertifikasi Bangunan Gedung di Indonesia, Malaysia* .

Yufiansyah. (2018). *Analisis Laik Fungsi Bangunan Hunian Vertikal*.

